

# Potensi USAHA MIKRO KECIL



KUNJUNGI LAMAN SITUS SE 2016 DENGAN MEN-SCAN QR CODE DI BAWAH INI



LAMAN SITUS <http://se2016.bps.go.id>

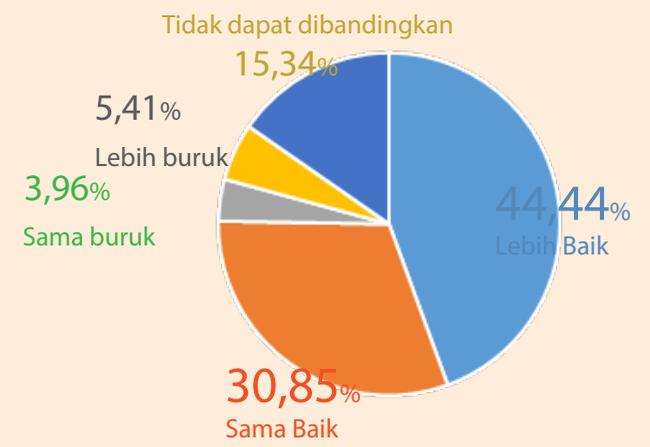


**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI**  
 Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar 80226  
 Telp.: (0361) 238159  
 Fax.: (0361) 238162  
 Homepage: <http://www.bali.bps.go.id>  
 e-Mail: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)

## PROSPEK UMK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek yang merupakan harapan atau kemungkinan dikaitkan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis, baik dari keuntungan maupun omset. Berdasarkan hasil SE2016 lanjutan tersebut, sekitar 44 persen pelaku UMK tercatat meyakini bahwa prospek usaha mereka akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hampir sepertiga pelaku UMK tercatat meyakini bahwa usaha mereka hanya akan sama baiknya dengan keadaan tahun sebelumnya. Hal ini kiranya menggambarkan bahwa sekitar 70 persen lebih pelaku UMK di Bali cenderung memiliki optimisme bahwa prospek usaha mereka pada tahun mendatang akan cerah atau menjanjikan. Sebaliknya, hanya sekitar 10 persen pelaku UMK cenderung pesimis dengan prospek usaha mereka di masa mendatang. Kondisi tersebut tercermin dari besaran persentase yang memperkirakan usaha mereka memburuk atau sama buruknya dengan keadaan saat pendataan, yang tercatat masing-masing 5,41 persen dan 3,96 persen. Sementara, sekitar 15 persen UMK di Bali yang menyatakan belum mampu membandingkan kondisi usahanya saat pendataan dengan prospeknya di masa mendatang.

Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2017

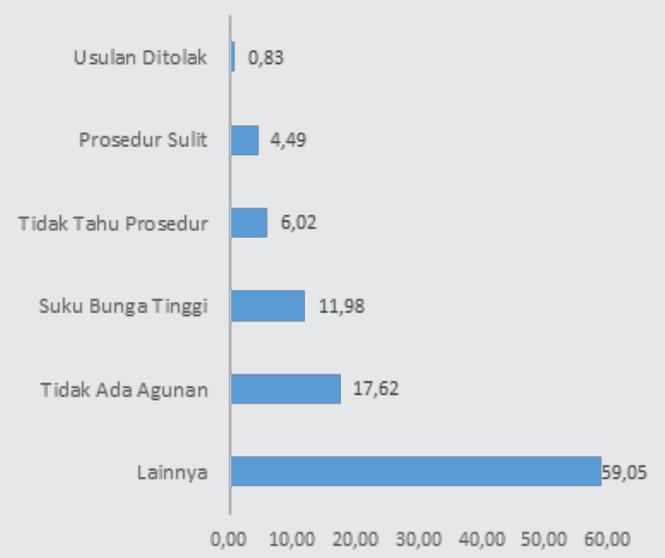


Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan

## AKSES PERMODALAN UMK

Dari sisi akses permodalan, lebih dari 81 persen pelaku UMK di Bali menyatakan tidak pernah menerima akses permodalan dari lembaga keuangan. Ketiadaan agunan sebagai jaminan menjadi alasan tertinggi (17 persen) mengapa usaha/perusahaan tidak pernah menerima kredit dari Lembaga keuangan. Alasan tertinggi lainnya adalah anggapan akan tingginya suku bunga yang diberlakukan (11 persen lebih). Sekitar 6 persen UMK mengaku tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit pinjaman dan, 4 persen pengusaha menganggap bahwa prosedur pengajuan kredit masih terlalu sulit untuk dipenuhi. Hanya sebagian kecil atau kurang dari satu persen yang menyatakan usulan besaran nominal kredit usaha yang diajukan, ditolak oleh lembaga keuangan.

Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan

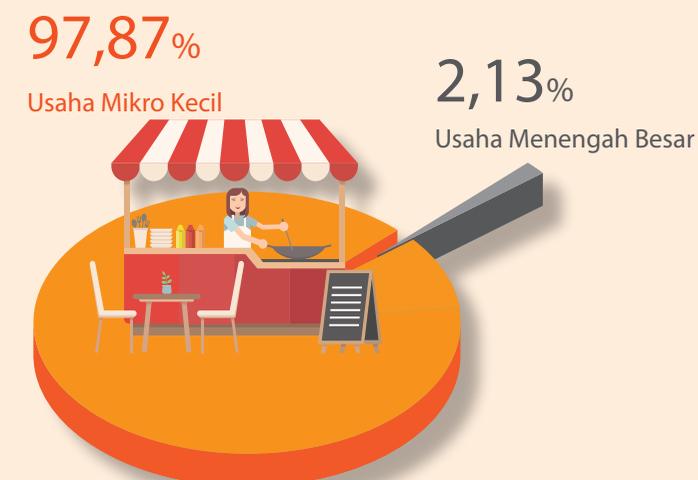
## APA ITU USAHA MIKRO KECIL (UMK) ?

UMK didefinisikan sebagai usaha selain Usaha Menengah Besar (UMB). Sementara UMB didefinisikan sebagai usaha/perusahaan yang berbadan hukum atau yang memiliki omset di atas 2,5 miliar.

## UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI BALI

Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) mencatat 97,87 persen usaha/perusahaan di Bali merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebagian besar (lebih dari 41 persen) tersebar pada Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sekitar 25 persen dan 18 persen.

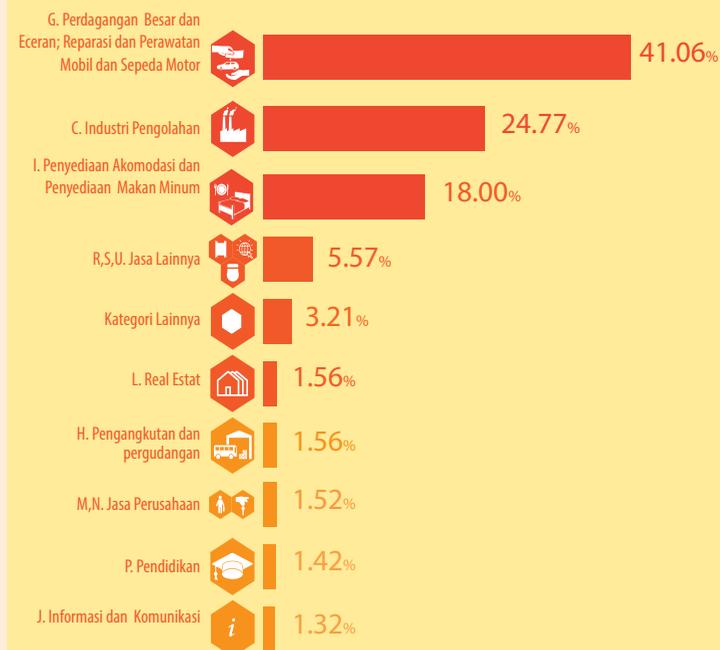
Persentase Jumlah Usaha Nonpertanian Menurut Status Usaha di Provinsi Bali, 2016



Sumber: BPS, SE2016-L

Dari 97,87 persen (dari total populasi usaha) UMK yang beroperasi di Bali sebagian besar bergerak pada Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) yang tercatat mencapai lebih dari 41 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sekitar 25 persen dan 18 persen dari seluruh populasi kegiatan usaha di Bali.

Persentase Jumlah UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Bali, 2016



Sumber: BPS, SE2016-L

## UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK

Berdasarkan hasil SE2016 Lanjutan, populasi UMK di Bali tercatat hampir sebesar 98 persen dari total populasi usaha yang ada. Angka ini menggambarkan dominasi populasi UMK terhadap UMB. Selain itu, UMK tercatat menyerap tenaga kerja sekitar 74 persen, atau 1,1 juta orang dari 1,5 juta pekerja yang terserap pada seluruh kegiatan usaha. Hasil SE2016 Lanjutan tersebut juga mencatat bahwa populasi UMK pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) merupakan yang terbesar populasinya.

Kategori UMK Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak (33,99 persen). Kategori Industri pengolahan (kategori C) menempati urutan kedua (23,76 persen) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum (kategori I) menempati urutan ketiga (16,89 persen). Akan tetapi oleh besarnya populasi, secara rata-rata per usaha, penyerapan tenaga kerja UMK di Bali hanya pada kisaran 2 pekerja per usaha.

## Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Bali, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
C. Industri Pengolahan	115.143	269.595	2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	190.863	385.669	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	7.233	10.904	2
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	83.653	191.620	2
J. Informasi dan Komunikasi	6.135	11.583	2
L. Real Estat	7.263	9.850	1
M,N. Jasa Perusahaan	7.060	21.896	3
P. Pendidikan	6.598	73.707	11
R,S,U. Jasa Lainnya	25.900	66.376	3
Kategori Lainnya	14.939	93.291	6
<b>Total</b>	<b>464.787</b>	<b>1.134.491</b>	<b>2</b>

Sumber: BPS, SE2016-L

## PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK di Bali cenderung memiliki karakteristik informal. Salah satunya dapat dilihat dari sisi kelembagaannya yaitu sebagian besar UMK di Bali tercatat sebagai usaha tidak berbadan hukum (93,01 persen). Sementara hanya 5,39 persen tercatat mengusahakan dengan ijin khusus dan, sisanya (1,60 persen) tercatat telah berbadan hukum. Meskipun secara total persentase UMK yang telah berbadan hukum masih minim, namun pada beberapa kategori usaha seperti aktivitas 'keuangan dan asuransi', 'pendidikan' dan 'aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial', tercatat persentase UMK yang berbadan hukum pada kategori usaha tersebut relatif tinggi yaitu masing-masing 82,30 persen, 78,21 persen, dan 56,99 persen.

Pengelolaan UMK di Bali tergolong masih sederhana, tercermin dari masih relatif rendahnya UMK yang tercatat menjalin kemitraan dengan pihak lain sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usahanya. Tercatat 5,02 persen UMK di Bali ikut

serta dalam kemitraan usaha. Lebih dalam, beberapa kategori usaha seperti 'pengadaan listrik gas/uap air panas dan udara dingin', 'konstruksi', 'aktivitas keuangan dan asuransi', 'jasa perusahaan' dan 'aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial' masing-masing tercatat lebih dari 10 persen UMK pada kategori-kategori tersebut telah menjalin kemitraan meskipun angkanya belum mencapai 20 persen.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan usaha pada skala UMK di Bali juga tercatat masih minim. Hanya 8,46 persen UMK tercatat menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya. Penggunaan internet oleh UMK pun menunjukkan catatan yang hampir sama, yaitu 11,19 persen. Namun demikian, pada beberapa kategori usaha, tercatat UMK yang memanfaatkan teknologi informasi (memanfaatkan komputer dan menggunakan internet) dengan persentase lebih dari 50 persen yaitu UMK pada kategori 'pengadaan listrik gas/uap air panas dan udara dingin' (Kategori D) dan 'pendidikan' (Kategori P). Menariknya, UMK pada kategori informasi dan komunikasi justru tercatat tidak sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi yaitu hanya 39,35 persen usaha yang menggunakan komputer dan 45,22 persen usaha saja yang memanfaatkan internet.

## Persentase Jumlah UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Bali, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
C. Industri Pengolahan	3,08	3,74	5,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,18	5,69	4,67
H. Pengangkutan dan pergudangan	9,69	8,41	7,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	3,82	5,02	2,84
J. Informasi dan Komunikasi	4,40	39,35	9,68
L. Real Estat	0,63	2,86	1,02
M,N. Jasa Perusahaan	19,79	45,93	13,74
P. Pendidikan	78,21	73,93	9,12
R,S,U. Jasa Lainnya	6,14	10,69	3,78
Kategori Lainnya	44,80	39,22	14,37
<b>Total</b>	<b>6,99</b>	<b>8,46</b>	<b>5,02</b>

Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan